

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dalam menjalankan upayanya, ILO melalui BWI berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia dan perusahaan untuk mencapai hak-hak pekerja garmen di Indonesia. Di Indonesia sendiri, hukum mengenai ketenagakerjaan di industri garmen tentunya telah lama dibentuk, namun proses implementasinya masih belum sempurna. Koordinasi dengan pemerintah Indonesia tentunya dapat menciptakan hasil yang efektif dalam industri garmen di Indonesia. Oleh karena itu, ILO melalui BWI menunjukkan adanya peran penting yang saling melengkapi dan menguatkan dengan lembaga ketenagakerjaan terkait dan serikat pekerja. Hal ini juga memenuhi fungsi pengaturan dari lembaga publik.

Selanjutnya, ILO melalui BWI juga bekerja sama dengan *brands* atau perusahaan untuk meningkatkan hak pekerja pada pemasoknya, yaitu industri garmen Indonesia. BWI hingga saat ini telah berafiliasi dengan 62 *brands*. BWI memperoleh transparansi dari perusahaan-perusahaan tersebut sehingga proses berjalannya bisnis dan terpenuhinya hak pekerja menjadi selaras. Beberapa *brand* tertentu juga dilaporkan telah mengikutsertakan staf mereka dalam pelatihan BWI mengenai metode penilaian, konsultasi, dan pelatihan Better Work. Staf yang mengikuti pelatihan dibekali berbagai materi untuk melakukan konsultasi antara perusahaan dan pemasok yang berfokus untuk meningkatkan mekanisme kerja sama dan *problem solving*.

Pada hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa ILO ikut serta berkontribusi dalam mewujudkan SDGs 5 dan SDG 8 di Indonesia terutama melalui program kemitraannya dengan IFC dan anggota World Bank Group meskipun belum sepenuhnya sempurna. Dalam isu upah, ILO melalui BWI akan terus bekerja sama untuk meraih tujuan-tujuan yang jelas dan memperbaiki sistem penentuan upah minimum di Indonesia. Selain itu, ILO juga akan terus mendorong kepatuhan dan kebijakan pengupahan yang lebih adil dan sesuai pada tingkat pabrik dan provinsi di Indonesia. Sedangkan dalam isu garmen, sektor garmen yang merupakan sektor penting bagi pekerja perempuan di Indonesia masih terdapat ketidaksetaraan dalam kesejahteraan dan kekuasaan antara perusahaan dan pekerja. Diskriminasi gender dalam industri garmen merupakan fokus ILO melalui Better Work Indonesia (BWI). Regulasi perlindungan hak pekerja perempuan telah diatur dalam berbagai konvensi internasional, serta hukum nasional di Indonesia.

Selain itu, ILO melalui BWI juga berupaya untuk mendorong pemberdayaan perempuan dalam industri garmen, termasuk melalui pembentukan komite bipartit yang efektif dan pelatihan keterampilan bagi supervisor perempuan. Upaya ini sejalan dengan tujuan ILO untuk meningkatkan kesetaraan gender di sektor garmen. Kunjungan dan inisiatif lainnya juga membantu dalam mempromosikan pekerjaan yang layak bagi perempuan dalam industri garmen di Indonesia.

Namun, hingga saat ini masih terjadi beberapa hambatan utama yang dihadapi oleh industri garmen Indonesia dalam proses pelaksanaan kebijakan-kebijakan ILO, yaitu:

- a. Masih kurangnya kesadaran pemerintah dan pelaku usaha
- b. Kurangnya informasi dan data yang didapatkan oleh pemerintah, pelaku usaha, dan pekerja
- c. Kurangnya sumber daya dalam kerangka kelembagaan

Hal ini disebabkan karena terdapat banyak pihak yang saling berkaitan dalam industri garmen. Banyaknya aktor tersebut tentu bukanlah hal yang mudah karena aktor-aktor tersebut belum tentu memiliki kesadaran dan tujuan yang sama. Proses berjalannya bisnis di industri garmen di Indonesia diharapkan untuk menghasilkan *win-win solution* bagi para perusahaan untuk meraih tujuan ekonominya dan para pekerja untuk mendapatkan hak-hak sosialnya. Walaupun dalam industri garmen proses implementasi kebijakan-kebijakan ini masih terdapat hambatan, namun ILO berkomitmen untuk terus membantu Indonesia guna menjamin sistem perlindungan sosial pekerja garmen secara universal, komprehensif, dan sesuai dengan standar jaminan yang telah diatur oleh ILO.

5.2 Saran

ILO sebagai organisasi internasional yang berfokus pada isu ketenagakerjaan diharapkan agar dapat lebih mendorong perusahaan dan pemerintah dalam mengimplementasikan regulasi-regulasi yang mengatur hak-hak pekerja garmen di Indonesia. Proses pencapaian SDGs dalam industri garmen di Indonesia pada dasarnya dapat dicapai apabila terdapat koordinasi yang kuat antara ILO sebagai organisasi internasional yang menaungi isu ketenagakerjaan. Lalu, ILO dapat lebih mempromosikan dan melakukan sosialisasi kepada pemerintah

Indonesia sehingga pemerintah dapat mengimplementasikannya pada perusahaan-perusahaan garmen yang terlibat.

Pemerintah Indonesia juga diharapkan untuk dapat membentuk suatu komite untuk mengawasi proses berjalannya regulasi. Hubungan tertentu yang masih terjadi antara pemerintah dan perusahaan pun harus lebih ditindaklanjuti dan diberikan sanksi yang tegas, karena hal tersebut hanya akan melancarkan berjalannya konflik kepentingan yang saling menguntungkan pihak di atas. Sedangkan pekerja cenderung menjadi korban dalam praktik konflik kepentingan tersebut. Terakhir, dialog sosial juga sangat perlu dilakukan antara pemerintah, perusahaan, dan serikat pekerja dalam melakukan perundingan dan diskusi mengenai permasalahan tertentu maupun sebuah kebijakan baru.

